



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
PANJA MIGAS KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, DIRJEN PENEGAKAN HUKUM  
KEMENTERIAN LHK RI, JAMPIDSUS KEJAKSAAN RI, KEPALA SKK MIGAS,  
KABARESKRIM POLRI, DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Jampidsus Kejaksaan RI, Kepala SKK Migas, Kabareskrim Polri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 4 Februari 2019
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gd. Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	: Ir. H.M. Ridwan Hisyam (Ketua Panja Migas Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 25 Orang Anggota Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI : ... Orang Anggota Panja Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. <i>Illegal Drilling</i> 2. Regulasi LPG 3 Kg 3. Dan lain-lain

**CATATAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Migas Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 dibuka pukul 13.40 WIB yang dipimpin oleh Ketua Panja Migas Komisi VII DPR RI Ir. H.M. Ridwan Hisyam, dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Panja Migas Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. *Illegal Drilling*
  - b. Regulasi LPG 3 Kg
  - c. Dan lain-lain

## II. CATATAN RAPAT

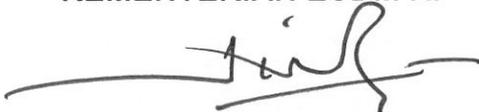
1. Panja Migas Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, Dirjen Gakkum Kementerian LHK RI, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia untuk membentuk Satgas secara berkelanjutan melaksanakan upaya pencegahan dan penindakan untuk kasus-kasus *illegal drilling*, *illegal tapping* dan *illegal refinery* di semua Wilayah Kerja KKKS dan untuk itu Komisi VII DPR RI akan membicarakan dan atau mengajukan surat usulan kepada Komisi terkait DPR RI dan Badan Anggaran untuk bisa ditambah anggaran terhadap instansi terkait.
2. Panja Migas Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif tentang regulasi LPG 3 Kg dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terutama difokuskan pada opsi distribusi tepat sasaran sesuai kontrak yang diberikan PT Pertamina (Persero) kepada agen dan agen kepada pangkalan dengan tetap menjamin masyarakat yang berhak tetap mendapatkan subsidi LPG 3 kg dan hasilnya dilaporkan kepada Panja Migas Komisi VII DPR RI.
3. Panja Migas Komisi VII sepakat untuk melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas, Dirjen Gakkum Kementerian LHK RI, Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum secara komprehensif baik pencegahan maupun penindakan atas kasus-kasus kriminal di subsektor hulu dan hilir migas.

4. Panja Migas Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina (Persero) untuk memutus hubungan kerja dengan Hiswana Migas karena rawan konflik kepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pejabat Pertamina tidak menjadi pengurus Hiswana Migas dan organisasi usaha migas lainnya.
5. Panja Migas Komisi VII DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Jampidsus Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti hasil RDP Panja Migas Komisi VII DPR RI.

**III. PENUTUP**

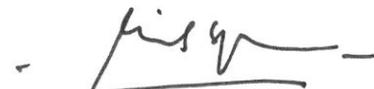
Rapat ditutup Pukul 16.45 WIB

**DIRJEN MIGAS  
KEMENTERIAN ESDM RI**



Dr. Ir. DJOKO SISWANTO, MBA

Jakarta, 4 Februari 2019  
**KETUA RAPAT,**



Ir. H.M. RIDWAN HISYAM

**DIRJEN GAKKUM KEMENTERIAN LHK RI**



Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com., MPM.

**KEPALA SKK MIGAS**



DWI SOETJIPTO

JAMPIDSUS KEJAKSAAN AGUNG RI



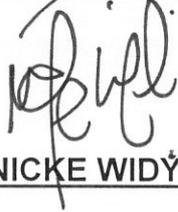
DR. ADI TOEGARISMAN

KABARESKRIM POLRI



KOMJEN POL. Drs. IDHAM AZIS, M.Si

DIREKTUR UTAMA  
PT PERTAMINA (PERSERO)



NICKE WIDYAWATI